

DINAMIKA POLITIK ISLAM SEMENANJUNG ARAB 1800-1930 M
(Pengaruh Berdirinya Kerajaan Arab Saudi Modern Terhadap Praktik
Keagamaan di Tanah Suci)

Ihwan Agustono

I

Kajian tentang politik dan sosial keagamaan dalam dunia Islam merupakan salah satu area yang cukup penting untuk dikaji. Salah satu pokok bahasan yang masih kurang mendapat perhatian adalah tentang dinamika politik di Tanah Suci antara awal abad ke-19 sampai dengan perempat pertama abad ke-20. Dari perubahan politik tersebut, kemudian diungkap tentang pengaruh apa saja yang ditimbulkan dalam praktik keagamaan di Tanah Suci. Pembahasan ini dianggap penting karena fenomena praktik keagamaan yang terjadi di daerah Hijaz dapat dikatakan unik. Fenomena perubahan paham keagamaan yang terjadi di Tanah Suci, yang sebelumnya terkenal sebagai pusat studi tradisional keagamaan Islam sejak berabad-abad lamanya, dapat berlangsung dalam waktu yang dapat dikatakan tidak terlalu lama. Sebuah paham baru yang ortodoks dapat menggeser paham tradisional yang sudah lama mengakar, bahkan kemudian menjadi lebih dominan hingga saat ini.

Berdasarkan landasan di atas, dalam penelitian yang berjudul dinamika politik Islam Semenanjung Arab 1800-1930 M: pengaruh berdirinya Kerajaan Arab Saudi Modern terhadap praktik keagamaan di Tanah Suci ini penulis mencoba untuk melacak secara lebih teliti tentang keadaan sosial politik serta keagamaan di Hijaz sebelum abad ke-19 serta perubahan-perubahan politik yang terjadi di Semenanjung Arab tahun 1800-1930 M. Untuk selanjutnya mengungkap pengaruh apa saja yang terjadi dalam praktik keagamaan di Hijaz dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi Modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, dengan melakukan studi perbandingan antara beberapa tulisan sejarah dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode sejarah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah kepustakaan (*library*

research). Telaah kepustakaan dilakukan dengan cara membaca karya-karya dengan subyek penelitian mengenai tema yang relevan dengan masalah sejarah Hijaz pada awal abad ke-19.

II

Hijaz (Mekah dan Madinah) pada era awal Islam memiliki posisi yang sangat penting, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Bahkan setelah peristiwa H̄ijrah, Madinah menjelma menjadi semacam pusat pemerintahan Islam. Begitu juga Mekah, kota suci ini juga mendapatkan perhatian yang luar biasa dari para elit Islam ketika itu sekaligus menjadi salah satu kota spiritual Islam terpenting selain Madinah. *Prestice* dua kota suci ini terus berlanjut pada masa Khulafā' al-Rāshidūn, dimana Madinah menjadi kota terpenting dalam pembentukan awal peradaban Islam, mengungguli kekaisaran Bizantium dan Sasania. Namun pasca pemerintahan Khulafā' al-Rāshidūn, secara berturut-turut, pusat pemerintahan Islam berpindah dari Madinah ke Damaskus kemudian selanjutnya berpindah ke Baghdad. Sejak saat itu, pamor Hijaz semakin menurun dan semakin jauh dari *mainstream* perpolitikan Islam. Akibatnya Hijaz hanya menjadi daerah vassal (*tabī'ah*) yang pemerintahannya selalu terkait (mengikuti) kebijakan-kebijakan dari pusat.

Peristiwa ini menimbulkan gejolak politik dan kekecewaan mendalam khususnya dari kelompok Syi'ah dan para *'Alawiyyīn* (keturunan 'Ali ibn Abī Ṭālib) di Madinah. Mereka menuntut dikembalikannya supremasi politik Madinah seperti dulu lagi. Puncaknya ketika Mekah di serbu oleh kelompok Syi'ah Qaramithah pada masa Daulah 'Abbāsiyyah dan berhasil membawa kabur *H̄ajar Aswad* dan membunuh puluhan ribu jamaah haji di Mekah. *H̄ajar Aswad* baru berhasil dibawa pulang kembali ke Mekah setelah dua puluh tiga tahun, yaitu pada masa Dinasti Fāṭimiyyah. Munculannya Dinasti Fāṭimiyyah yang beraliran Syi'ah pada abad ke-10 M memperlihatkan hasil nyata perjuangan kelompok *'Alawiyyīn* dalam menguasai negeri-negeri penting yang sebelumnya tunduk pada Baghdad. Pada saat yang bersamaan, di Hijaz kelompok *'Alawiyyīn* juga berhasil mendirikan sebuah model pemerintahan, yang pimpinan tertingginya adalah para *Sharīf*. Inilah awal berlakunya *Nizām al-Ashrāf* di Hijaz, dengan Mekah sebagai pusatnya. Sejak itu

sampai akhir abad ke-18, Hijaz dalam sebagian besar sejarahnya menjadi negeri taklukan dari dinasti-dinasti yang berkuasa di Mesir, tidak terkecuali ketika Turki ‘Uthmānī menguasai hampir seluruh wilayah Semenanjung Arab sejak abad ke-16 M, dimana saat itu Hijaz menjadi salah satu bagian dari wilayah Mesir, salah satu propinsi Turki Uthmānī.

Berkaitan dengan aktifitas ibadah di Hijaz, terdapat sebuah aktifitas unik yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sejak masa Dinasti Fāṭimiyah abad ke-10, yaitu berbilangnya shalat berjamaah dalam empat *maqāmāt* shalat (Ḥanafī, Mālīkī, Shāfi‘ī, dan Ḥanbalī). Fenomena ini sempat selama bertahan sepuluh abad, sebelum pada akhirnya dihapuskan oleh Dinasti Su‘ūd I. Dalam dunia pendidikan, sebelum berdirinya sekolah-sekolah modern, lembaga pendidikan di Hijaz hanya terdiri atas dua jenjang, yaitu *al-Ta’līm al-Awwalī* (lembaga pendidikan dasar) dan *al-Ta’līm al-‘Ālī* (lembaga pendidikan tinggi). *Al-Ta’līm al-Awwalī* adalah proses belajar mengajar yang berlangsung di *Kuttāb*, sedangkan *al-Ta’līm al-‘Ālī* biasanya berupa *ḥalaqah-ḥalaqah* keilmuan di Masjidil Haram yang dianggap setara dengan apa yang dimiliki oleh Universitas al-Azhar di Mesir. Sedangkan berkaitan dengan hubungan antara syariat dan tasawuf, secara umum era sebelum abad ke-19 diwarnai dengan ketegangan antara Islam yang berorientasi dengan syariat dan sufisme. Sufisme yang pada awal abad pertengahan nampak mendominasi Hijaz, akhirnya tergeser oleh semangat ortodoksi dan *neo-sufisme* pada awal abad ke-19. Dari fenomena di atas, nampaknya pencapaian-pencapaian yang diraih oleh Hijaz, baik dalam bidang politik, pendidikan, dan ilmu pengetahuan belum sebanding dengan pencapaian yang terjadi di daerah-daerah penting Islam lainnya seperti Baghdad dan Mesir dikarenakan minimnya perhatian yang diberikan oleh para penguasa Islam, selain juga karena semakin jauhnya Hijaz dari pusat pemerintahan Islam.

III

Memasuki awal abad ke-19 M, Hijaz memiliki dinamika perubahan politik yang sangat *intense* dan saling terkait satu sama lain yang juga membawa dampak besar terhadap aspek sosial keagamaan di sana. Hegemoni bangsa-bangsa Eropa terhadap dunia Islam dengan membawa ide-ide nasionalisme, *symbiosis mutatis*

antara pembaruan keagamaan Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb dan gerakan politik Dinasti Su‘ūd I di Hijaz yang tidak lama kemudian berhasil dilumpuhkan oleh Muhammad ‘Alī Pāshā dari Mesir, serta revolusi Arab singkat oleh *Sharīf* Ḥusayn yang menandai berakhirnya sistem *Nizām al-Ashrāf* di Hijaz, yang mana seluruh episode panjang ini ditutup dengan berdirinya Kerajaan Arab Saudi Modern pada awal abad ke-20 adalah diantara dinamika politik penting yang patut digaris bawahi.

Abad ke-19 merupakan awal bangsa-bangsa Eropa mulai mendominasi dunia, termasuk terhadap negeri-negeri muslim yang sebelumnya berada dalam kontrol penuh Turki Uthmāni. Bermodalkan sains, filsafat, dan pemikiran rasional yang mereka bawa dari Spanyol Islam menggantikan pemikiran dogmatis Gereja abad pertengahan, Prancis dan Inggris berhasil memelopori timbulnya renaisans di Eropa. Era kolonialisme Eropa terhadap dunia Islam dimulai dengan menjajah negeri-negeri tersebut untuk dieksploitasi sedemikian rupa dan dipaksa mengkonsumsi produk-produk mereka, baik berupa hasil industri maupun pemikiran. Di sisi lain, Turki Uthmāni nampak tidak dapat mengimbangi persenjataan Inggris dan Prancis yang semakin modern. Sehingga, Turki Uthmāni lebih memilih untuk mempertahankan apa yang sudah dimilikinya saja daripada aktif melakukan serangan. Memang Turki Uthmāni dalam peperangannya dengan Eropa mulai dari abad ke-18 selalu mengalami kekalahan sehingga ia digelar *The Sick Man of Europe*. Di antara produk penjajah yang dipropagandakan di dunia Islam adalah ide nasionalisme. Dengan semangat nasionalisme tersebut, negara-negara Islam baru mulai terbentuk, terlepas dari pengaruh Istanbul. Keadaan Islam yang memprihatinkan ini akhirnya menggugah para pembaru muslim, diantaranya adalah Jamāl al-Dīn al-Afghānī (w.1897 M). Ia mengajak umat Islam bersatu menolak kolonialisme dan hegemoni Eropa terhadap dunia Islam dengan gerakan *Pan Islamisme*-nya.

Pengaruh Eropa dalam dunia Islam berlanjut. Dengan dukungan dari Inggris, Muḥammad bin ‘Abd al-Wahhāb menggalang sebuah kesepakatan dengan *āmīr* Muḥammad ibn Sa‘ūd untuk saling membela gerakan masing-masing yang pada akhirnya menjadi padu dalam sebuah gerakan politik dan keagamaan. Dengan

semangat pemurnian tauhid, mereka melakukan aneksasi teritorial di berbagai wilayah Semenanjung Arabia untuk menyebarkan ajaran Wahhabi ke semua kawasan tersebut. Kunci keberhasilan aneksasi ini antara lain karena, baik Wahhabi maupun Dinasti Su'ūd, sama-sama menyadari bahwa legitimasi politik yang bersumber dari justifikasi agama akan melahirkan sebuah loyalitas yang tinggi. Akan tetapi keberhasilan awal ini tidak berlangsung lama ketika pada 1818 M, kekuatan Dinasti Su'ūd I berhasil dilumpuhkan Turki Uthmānī yang diwakili oleh Muhammad 'Alī Pāshā, gubernur Mesir yang sebelumnya juga telah berhasil mengakhiri kolonialisme Napoleon Bonaparte dari Prancis atas negeri Fir'aun tersebut pada akhir abad ke-18. Namun dengan semakin melemahnya Turki Uthmānī, Muhammad 'Alī Pāshā akhirnya berani memproklamirkan diri sebagai penguasa penuh Mesir, terlepas dari pengaruh Istanbul. Kekuasaan Muhammad 'Alī Pāshā atas Mesir dan juga Hijaz sebagai daerah *vassal*-nya ini dapat bertahan sampai sekitar pertengahan abad ke-19.

Awal abad ke-20 ditandai dengan melemahnya pengaruh keluarga penerus Muhammad 'Alī Pāshā di Hijaz. Sultan Ḥamīd II, Khalifah Turki Uthmānī saat itu, segera memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat posisinya di Hijaz dengan mengangkat orang kepercayaannya, *Sharīf* Ḥusayn ibn 'Ali ibn 'Abdillāh, sebagai penguasa baru Hijaz. Namun pada 1916 M, tidak lama setelah Sultan Ḥamīd II turun tahta, *Sharīf* Ḥusayn mengumumkan Revolusi Arab terhadap pemerintahan pusat Turki 'Uthmānī. Dengan deklarasi ini, Hijaz dinyatakan berdiri sendiri, terlepas dari pengaruh Turki 'Uthmānī. Selanjutnya, *Sharīf* Ḥusayn betul-betul menjadi sosok penguasa baru di Hijaz dan berkedudukan di Mekah. Ia mengubah gelarnya dari *Sharīf* Mekah menjadi *Mālik* (Raja), serta meninggalkan *Nizām al-Ashrāf* untuk kemudian menggantinya dengan *Nizām al-Mamlakah* (sistem monarki). Revolusi *Sharīf* Ḥusayn ini mengakhiri sejarah panjang sistem pemerintahan *Nizām al-Ashrāf* di Hijaz. Sekali lagi, pengaruh propaganda Eropa tidak dapat dinafikan dalam peristiwa ini, mengingat gerakan *Sharīf* Ḥusayn ini tidak dapat dilepaskan dari janji dukungan yang disampaikan oleh pihak Kerajaan Inggris terhadap *Sharīf* Ḥusayn.

Pada waktu yang hampir bersamaan di wilayah Hijaz lainnya, ‘Abd al-‘Azīz ibn Sa’ūd, penerus Dinasti Su’ūd yang masih bertahan, berhasil menguasai Riyadh. Ia kemudian memproklamirkan dirinya sebagai *Imām* (pemimpin) orang-orang Wahhabi, sekaligus menghidupkan kembali Dinasti Su’ūd I yang dulu sempat menguasai Hijaz. Pada 1924 M, pasca runtuhnya Imperium Turki Uthmānī setelah kekalahan tragis dalam Perang Dunia I, ‘Abd al-‘Azīz ibn Sa’ūd berhasil menduduki Mekah, setahun kemudian menduduki Madinah dan Jeddah, dan puncaknya pada 1932 M ia memproklamirkan berdirinya Kerajaan Arab Saudi Modern dengan dirinya sebagai raja.

IV

Dari kacamata sosial keagamaan, paling tidak ada empat tradisi keagamaan yang ikut terpengaruh akibat dari dinamika politik Semenanjung Arab tersebut, yaitu: *Pertama*, dalam bidang pemurnian tauhid; *Kedua*, tradisi pelaksanaan shalat berjamaah di Tanah Suci; *Ketiga*, perkembangan pendidikan, dan; *Keempat*, hubungan antara syariat dan tasawuf.

Dengan berdirinya Kerajaan Saudi Modern, Hijaz kembali dibersihkan dari praktik-praktik takhayul, *khurafāt*, tarekat populer dan tradisi keagamaan penduduk yang menurut mereka telah menyimpang dari ajaran agama yang benar. Sebagaimana pada masa Dinasti Su’ūd I, gerakan pemurnian syariat ini melibatkan intervensi langsung dari pemerintah Arab Saudi. Kerajaan mengontrol dengan ketat seluruh aktifitas keagamaan penduduknya agar tetap sejalan dengan pandangan Wahhabi. Maka tidak mengherankan bila doktrin Wahhabi ini memiliki karakter militan dan ekstrim, karena memang gerakannya bertumpu pada kekuatan militer penguasa. Salah satu contohnya adalah doktrin tentang *jihad*. Doktrin *jihad* sebagai salah satu doktrin terpenting faham Wahhabi telah melahirkan sikap antagonistik mereka, bukan saja kepada komunitas non-muslim, tetapi juga kepada sesama muslim. Bagi Wahhabi, akidah komunitas muslim yang faham keagamaannya berbeda dengan mereka dalam tingkat yang ekstrim dapat menggugurkan iman mereka. Kebijakan lainnya adalah dihapuskannya tradisi berbilangnya shalat berjamaah yang sudah berlangsung lama di Tanah Suci. Saat Dinasti Su’ūd I menguasai Hijaz, di Masjidil Haram hanya dilakukan satu kali shalat berjamaah

dengan satu imam saja untuk setiap waktu shalat. Pada era Arab Saudi Modern, kerajaan mengangkat imam-imam masjid yang beraliran Wahhabi sekaligus menjadikan ajaran tersebut sebagai '*madhhab*' resmi kerajaan. Selanjutnya kerajaan memiliki hak mutlak dalam memberikan lisensi kepada para imam shalat di Masjidil Haram dan masjid Nabawi sekaligus mengangkat dan memberhentikan mereka.

Dalam bidang pendidikan, kecuali memerintahkan pembelajaran kitab *Kashf al-Shubhāt*, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh dan berisi ajaran-ajaran Muhammad ibn 'Abd al-Wahhāb, untuk diajarkan sebagai materi wajib di seluruh *ḥalaqah-ḥalaqah* umum di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Dinasti Su'ūd I tidak banyak melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Sedangkan pada awal Kerajaan Arab Saudi Modern, 'Abd al-'Azīz ibn Sa'ūd sudah mulai mengirimkan beberapa pemudanya ke luar negeri untuk belajar ilmu-ilmu modern walaupun kebijakan ini tidak ditunjang dengan lembaga-lembaga pendidikan modern bagi warga Arab Saudi sendiri yang mayoritas masih buta aksara. Jadi, di Hijaz kala itu kondisi pendidikannya masih sangat memprihatinkan. Dalam bidang syariat dan tasawuf, kelompok Wahhabi telah menjelma menjadi sebuah gerakan revivalisme pra-modernis yang menyeru untuk kembali kepada sumber asli agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis, serta meninggalkan praktik-pratik tasawuf populer dan tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran mereka. Fenomena ini menandai tergesernya tradisi tasawuf populer di Hijaz oleh gerakan *neo-sufisme* yang radikal dan ortodoks.